



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMONA DAULAY
2. Jabatan : WAKIL DEKAN III
3. NHK : 815175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 423 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 231.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 207.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 383.865.984

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.314.865.984

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.314.865.984

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.